

# PELUANG DAN TANTANGAN KIPRAH POLITIK ELIT AGAMA DI ERA REFORMASI<sup>1</sup>

Oleh  
Suswanta<sup>2</sup>

## Pendahuluan

Salah satu masalah penting dan menarik di era reformasi adalah maraknya keterlibatan para elit agama dalam proses politik. Era reformasi memberi kesempatan kepada semua pihak, termasuk elit agama ( dalam Islam disebut ulama atau kiai<sup>3</sup> ) untuk terjun dalam dunia politik praktis. Tulisan ini akan fokus pada penjelasan kiprah politik kiai di era reformasi. Kiai yang dulu hanya dimanfaatkan sebagai pendulang massa dan pembaca doa oleh politisi pada waktu kampanye, sekarang tidak lagi berada di belakang panggung, tapi maju ke depan panggung. Kiai tidak lagi sekedar menjadi makelar budaya (*cultural broker*), akan tetapi menjadi pemain politik (*political player*) dalam pemilu legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah. Beberapa kiai bahkan ada yang terpilih menjadi pemimpin politik (*political leader*).

Beberapa kiai yang menjadi pemimpin partai politik antara lain, K.H. Syukron Makmun, ulama NU yang aktif dalam organisasi dakwah *ittihadul muballighin* di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Beliau mendirikan PNU (Partai Nahdlatul Ummah). PNU mendapat dukungan dari K.H. Idham Chalid, mantan ketua umum PBNU dan K.H. Sahal Mahfudz, Syuriah PBNU. Sedangkan K.H. Yusuf Hasyim (paman Gus Dur) mendirikan PKU (Partai Kebangkitan Ummat) dan mendapat dukungan dari K.H. Shalahuddin Wahid (adik kandung Gus Dur). Sementara itu, K.H. Abdurrahman Wahid (lebih dikenal dengan nama Gus Dur), adalah kiai pertama yang berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Adapun kiai yang

---

1 Disampaikan dalam Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu 30 Maret 2016

2 Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3 Kiai merupakan kata yang sangat familiar dalam masyarakat Indonesia, bahkan khas (*genuine*) dari Indonesia. Terminologi kiai dalam arti cerdas pandai dalam agama Islam telah menjadi terminologi sosiologis-religius yang mengakar kuat dalam kultur masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa timur. Di daerah lain di Indonesia, ada beberapa sebutan yang secara substansial maknanya sama dengan kiai. Di Jawa Barat ada sebutan Ajengan, di Aceh ada sebutan Teungku Dayah, di Minangkabau ada sebutan Buya, dan di Nusa Tenggara Barat ada sebutan Tuan Guru.

dicalonkan sebagai wakil presiden adalah K.H. Hasyim Muzadi dan K.H. Shalahuddin Wahid. Selain beberapa kiai tersebut, masih banyak kiai-kiai lain yang menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat serta calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Fuad Amin adalah kiai yang berhasil menjadi bupati kabupaten Bnagkalan Madura. Sementara itu, Tuan Guru Bajang H.M. Zaenul Majdi berhasil terpilih menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara khusus, tulisan ini bermaksud menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi pendorong terbukanya peluang kiprah politik kiai di era reformasi, perspektif tentang kiprah politik kiai dan bagaimana tantangan kiprah politik kiai di era reformasi. Studi ini menjadi penting karena kiprah politik kiai tidak hanya akan berdampak pada citra diri mereka sendiri, tetapi juga pada citra partai, umat dan agama.

### **Faktor Pendorong Kiprah Politik Kiai**

Sebagai aktor yang mempunyai kharisma dan basis massa, maka kiai memiliki peran yang sangat strategis jika menjadi pemain politik. Ada lima hal yang menjadi faktor utama pendorong kehadiran kiai di pentas politik,<sup>4</sup> yaitu : *Pertama*, kurangnya kepercayaan diri para politisi sipil akan kemampuan (diri dan partai/mesin politik) untuk mengolah dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin publik. Minimnya politisinya yang mempunyai basis massa membuat kiai yang diposisikan memiliki “umat” dijadikan penyangga kekuasaan. *Kedua*, rapuhnya jaminan kekuasaan di tingkat konstitusi karena tidak ada partai politik yang menjadi pemenang mayoritas di parlemen (DPR/MPR). Kekuasaan partai politik yang rapuh terbantu oleh hadirnya kiai yang kharismatik dan mempunyai massa solid. *Ketiga*, menguatnya kontrol parlemen dan ekstraparlemen karena berkembangnya pendidikan politik di masyarakat. Tingkat melek politik rakyat juga ditopang dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya perkembangan media sosial yang memungkinkan adanya kontrol dan kritik terhadap kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif selama dua puluh empat jam. *Keempat*, minimnya kekuasaan dan dukungan partisipan bagi para calon legislator, kepala daerah/ wakil atau calon presiden/wakil presiden sebagai konsekuensi sistem multi partai. Kekuasaan presiden yang lemah di tingkat parlementariat akan ditopang oleh kekuatan ekstraparlemen yaitu organisasi masyarakat (ormas) tempat bernaung para kiai sebagai partai politik bayangan yang mempunyai massa real, solid dan fanatik. *Kelima*, adanya keyakinan dari kiai bahwa dengan berpolitik memudahkan mereka memperjuangkan idealitas dan

---

4 Komaruddin Hidayat dan M.Yudie Haryono, *Manuver Politik Ulama : Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*, (Yogyakarta : Jalasutra, 2004), hal. 39

moralitas. Jabatan publik adalah sarana efektif dan efisien untuk memperbaiki kondisi bangsa menuju cita-cita kemerdekaan.

Massifnya partisipasi politik kiai didorong adanya keterbukaan politik era reformasi. Undang-Undang Parpol, pemilu dan pilkada pasca Orba memberi kesempatan kepada semua elemen bangsa untuk berperan secara aktif dalam politik, yaitu memiliki hak dipilih dan memilih. Kesempatan tersebut dimanfaatkan semua pihak -termasuk kiai- setelah sebelumnya hidup dalam sistem politik era Orde Baru yang membatasi atau tidak memberi kesempatan semua pihak melakukan partisipasi politik secara real. Perbedaan antara Orde Baru dan Reformasi dapat dilihat dari aktor politik, modal politik, sikap/partisipasi politik, motif dan pesan politik, serta komunikasi dan alat kontrol politik. Aktor politik era Orde Baru didominasi oleh aparatur negara, elit Golongan Karya dan militer, sementara era reformasi memberi kesempatan kepada kiai, artis, guru, pebisnis dan semua pihak menjadi aktor politik. Dilihat dari sikap dan partisipasi politik terjadi perbedaan mencolok antara era Orde Baru dan reformasi. Sikap politik era Orba dibangun atas prinsip keterpaksaan dan ancaman, sehingga monoton, semu, penuh tipu dan kepura-puraan, sandiwara serta kebohongan publik. Sementara sikap dan partisipasi politik era reformasi sangat beragam, penuh kompetisi dan berbiaya tinggi alias mahal. Secara ringkas, perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1  
Perbedaan Orde Baru dan Reformasi<sup>5</sup>

<b>Pembeda</b>	<b>Orde Baru</b>	<b>Orde Reformasi</b>
Aktor Politik	Aparatur negara, ABRI (militer) , milisi, famili dan koneksitas geneologis dan biologis	Pemuka agama (kiai, ustadz), guru, pengusaha dan profesi lain
Modal Politik	Koneksitas politik, kedekatan dengan keluarga Cendana, KKN	Massa, kompetensi, dana, kharisma
Sikap/Partisipasi Politik	Tunggal, monoton, kesadaran semu, hasil mobilisasi dan memerlukan dan tapi tidak terlalu besar	Beragam, kompetitif, kesadaran politik, hasil mobilisasi dan mahal
Motif Politik	Aman, Tenteram, Statis, Seragam dan Tunggal	Dinamis, Partisipatif, Beragam, Popularitas
Pesan Politik	Tunggal, satu arah, eufimisme dan tidak berpihak kepada rakyat	Beragam, multiarah, terang, vulgar dan berslogan pro rakyat
Komunikasi Politik	Didominasi pejabat pemerintah, militer, satu arah (hanya dari pemerintah)	Menyebar ke seluruh elemen masyarakat, LSM, Kampus, Pesantren dan dua arah (pemerintah dan masyarakat)
Alat Kontrol	Sentralisasi oleh pemerintah melalui	Desentralisasi (umat, partai, ormas) dan

5 Terinspirasi dari Komaruddin Hidayat, *Ibid*, hal. 52

Politik	aturan yang represif (Departemen Penerangan dan militer)	peraturan yang relatif partisipatif
---------	--	-------------------------------------

### **Antara Pemikiran Substantif dan Formalistik**

Dibanding dengan agama lain, relasi Islam dan politik lebih problematik. Dalam agama selain Islam, relasi agama dan politik sudah jelas terpisah. Agama adalah urusan privat, sementara politik adalah ranah publik. Konsekuensinya, elit agama selain Islam tidak akan terjun dalam politik praktis, menjadi pemain atau pemimpin politik. Mereka tetap menjadi penjaga moral - meski bukan berarti apriori terhadap politik - tetapi menjaga jarak atau mengambil posisi di luar.

Sementara itu, dalam Islam setidaknya ada dua varian pemikiran tentang relasi agama dan politik, yaitu substantif dan formalis. Pemikiran substantif beranggapan bahwa antara Islam dan politik itu terpisah. Pemikiran ini melahirkan sikap antipati politik<sup>6</sup> terkait dengan keterlibatan elit agama dalam politik. Habitus, fungsi dan tugas antara kiai dan politisi itu berbeda. Habitus kiai adalah nilai-nilai pesantren, yaitu nilai-nilai religius, seperti sabar, tawakal, ikhlas dan sederhana, sementara dunia politik identik nilai pragmatis, oportunistis, pamrih dan gaya hidup mewah. Perilaku politik seseorang sangat ditentukan oleh habitus mereka masing-masing.<sup>7</sup>

Dunia kiai adalah agama yang sakral dan dogmatis, sementara dunia politik politik adalah profan yang menuntut rasionalisasi dan sekulerisasi. Ranah gerakan kiai adalah

---

<sup>6</sup> Antipati mempunyai dua arti, *Pertama*, penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. *Kedua*, perasaan menentang objek tertentu yang bersifat personal dan abstrak. Lihat Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cetakan Ketiga, hal. 43

<sup>7</sup> Habitus adalah watak (*disposisi*) yang dimiliki oleh individu (dalam hal ini kiai khos) untuk memberikan persepsi dan respon dengan cara tertentu terhadap lingkungan sekitarnya. Disposisi ini bersifat sosial karena merupakan kemampuan yang ditanamkan oleh lingkungan asal dari individu yang bersangkutan. Ditanamkan ke dalam individu tersebut sejak kecil di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial yang lain (pesantren). Akan tetapi, karena proses penanaman disposisi ini berlangsung lama, terus menerus, dan alamiah, maka beroperasi pada individu secara spontan dan instinktif. Karena merupakan hasil proses sosial, maka habitus itu dimungkinkan secara struktur atau terstrukturkan. Akan tetapi karena telah tertanam begitu kuat dan dalam, bersifat spontan dan instinktif, habitus tersebut menyatu dengan subjek dan menjadi kekuatan yang menstrukturkan. Selain itu, habitus itupun tidak sepenuhnya harus patuh pada struktur, melainkan dapat mengalami modifikasi atau fleksibilitas sesuai dengan tuntutan yang dihadapi oleh situasi dan kondisi aktual yang dihadapi pemiliknya. Lihat Faruk, *Ibid*, hal. xxv-xxvii

kultural yang berorientasi sosial kemasyarakatan, sedangkan ranah gerakan politisi adalah politik yang berorientasi kekuasaan. Keterlibatan kiai dalam politik hanya akan berdampak negatif baik bagi kiai sendiri, umat maupun bagi agama. Kiai akan mengalami delegitimasi peran, fungsi dan moral. Umat, terutama santri akan terlantar karena tidak ada lagi yang mengajari dan membimbing mereka. Pesantren dan madrasah tidak akan berkembang karena sang kiai sibuk dengan urusan politik. Hadirnya kiai dalam politik juga akan menyuburkan fenomena politisasi agama, yaitu penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik jangka pendek yang bersifat duniawi dan materi. Dengan demikian, kiai harus kembali ke habitatnya ke pesantren sebagai guru yang mendidik umat dengan agama dan keteladanan. Politik biarlah menjadi habitat politisi yang profesional. Tugas kiai adalah menjaga moral politik, jika terjadi penyimpangan dan pembusukan. Kiai harus mengawasi, mengingatkan, dan menegur politisi jika salah arah tanpa harus terjun ke dunia politik. Politik kiai adalah politik moral dan kebangsaan bukan politik praktis dan pragmatis.

Kelemahan pemikiran substantif sekaligus sikap antipati politik ini adalah bertentangan dengan hakekat fakta dan sejarah Islam yang tidak membedakan agama dan politik. Pernyataan bahwa keterlibatan kiai dalam politik pasti berakibat negatif juga problematik, mengingat ada kiai politisi yang tetap bersih dan idealis berkomitmen pada moral. Nabi, para sahabat dan para kiai baik di kalangan NU maupun organisasi Islam lain yang menjadi *founding fathers* negeri ini menjadi bukti masih ada kiai politisi yang bersih

Adapun varian pemikiran kedua adalah formalistik. Berbeda dengan aliran pertama, aliran kedua ini berpendapat bahwa Islam dan politik tidak terpisah. Pemikiran ini melahirkan sikap simpati politik<sup>8</sup> terkait dengan keterlibatan elit agama dalam politik. Menurut aliran ini, politik adalah bagian dari agama. Muhammad SAW bukan sekedar nabi, tetapi juga sekaligus politisi. Sejarah mencatat bahwa Muhammad SAW dalam kurun waktu singkat selama 23 tahun tidak hanya berhasil melakukan revolusi moral melalui karir kenabian, melainkan juga revolusi sosial dan politik melalui pembentukan sistem masyarakat dan politik di Madinah. Sebagai politisi, Muhammad SAW telah membangun “kontrak politik” yang dikenal dengan “*Mitsaq al-Madinah*” atau Piagam Madinah antara umat Islam dan kelompok sosial lain di Madinah. Piagam tersebut adalah “*watsiqah siyasiyah*” atau dokumen politik yang menjamin kebebasan beragama, berpendapat, perlindungan atas

---

<sup>8</sup> Sementara itu, simpati bermakna rasa suka, rasa kasih atau rasa setuju kepada. Lihat, Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Ibid*, hal. 841

negara, hak hidup, hak milik, dan pelarangan kejahatan.<sup>9</sup> Meskipun tidak sebagai nabi, akan tetapi kepemimpinan khalifah pasca nabi adalah kepemimpinan agama sekaligus politik.

Berkaitan dengan itu, K.H. Abdullah Faqih mengatakan :

“Sebenarnya, sebagai pewaris para nabi (*waratsatul anbiya*), keterlibatan kiai dalam dunia politik merupakan sebuah keharusan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, selain dipahami sebagai peristiwa keagamaan, juga merupakan peristiwa politik dalam rangka membangun masyarakat dan pemerintah kota Madinah yang damai, tenteram, tenang, adil dan makmur. Peran Nabi Muhammad SAW waktu itu, selain menjalankan tugas mengajar (*ta'lim*) para sahabat, sewaktu-waktu beliau terjun ke medan laga untuk memimpin pasukan Islam dalam rangka menumpas musuh-musuhnya. Peran kiai hendaknya juga demikian. Selain menjalankan tugas mengajar (*ta'lim*) santri-santrinya, suatu saat para kiai harus ikut membantu urusan negara (politik) sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Jika para kiai hanya mengurus pesantrennya dan tidak tahu-menahu soal urusan negara (politik), pada akhirnya pemerintah dikuasai orang-orang yang anti-Islam, antipesantren, dan anti-ajaran *ahlusunnah waljamaah*. Siapa yang harus menanggung akibatnya? Jadi, sebenarnya keterlibatan kiai dalam politik itu bertujuan menyelamatkan peran kiai itu sendiri.”<sup>10</sup>

Perspektif kedua ini memberi penjelasan tentang landasan syar'i penyatuan agama dan politik. Dalam pandangan perspektif ini, nabi, para sahabat dan ulama memberi teladan bahwa politik adalah dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Teladan yang diberikan nabi, para sahabat dan ulama memang bisa menjadi inspirasi dan ilham bagaimana berpolitik di era global ini, akan tetapi tentu bukan berarti berfungsi sebagai “juklak” dan “juknis” yang harus diterapkan 100% tanpa ada perubahan, mengingat ada perbedaan konteks sosial, politik, dan sejarah. Perspektif kedua ini belum mampu memberi penjelasan tentang fenomena kiai politisi yang korup, pragmatis dan melakukan politisasi agama untuk kepentingan duniawi. Inilah kelemahan perspektif kedua.

### **Tantangan Kiprah Politik Elit Agama di Era Reformasi**

Elit agama sudah terlanjur identik dengan pembawa pesan moral. Oleh karena itu, jika kiai mampu menjalankan peran politik yang sangat strategis tersebut dengan baik, maka akan terjadi pencerahan politik. Agama mewarnai politik, agama menuntun politik. Kiprah politik mereka menjadi pembeda antara politisi baik dan politisi busuk. Akan tetapi jika yang terjadi

---

<sup>9</sup> Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhammad* dalam Ulil Absar- Abdalla, *Muhammad : Nabi dan Politikus*, Media Indonesia, 4 Mei 2005. Lihat juga <http://islamlib.com>, 4 Mei 2005

<sup>10</sup> K.H. Abdullah Faqih adalah pimpinan pondok pesantren Langitan Tuban sekaligus pemimpin kiai khas. Tausiah disampaikan dalam pengajian massa PKNU

sebaliknya, maka akan muncul krisis legitimasi (*legitimation crisis*), yakni himbuan moral mereka tidak lagi didengar publik karena mereka sendiri menjadi pelanggar moral. Kepentingan politik mengkooptasi agama. Terjadilah apa yang disebut dengan fenomena politisasi agama. Elit agama terperangkap dalam budaya “politik kebun binatang” yang menjadikan politik hanya sebagai arena mengejar dan memenuhi syahwat kekuasaan.

Dengan kata lain, perspektif kedua ini belum memberi penjelasan indikator keberhasilan politik kiai agar kontributif dan solutif. Bertolak dari hal ini, menjadi penting perumusan perspektif baru terkait keterlibatan kiai dalam politik yang sesuai dengan tantangan saat ini, khususnya indikator keberhasilannya, agar politik kiai memberi kontribusi dan solusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim, 1995, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LKiS
- Abdul Chalik, 2010, *NU Pasca Orba*, Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tidak Dibukukan
- Abdul Haris, 2010, *Pergeseran Perilaku Politik Kultural NU di Era Multi Partai Pasca Orba*
- Abdul Wahid, *Mutilasi Peran Esoteris Kiai*, Padang To Day, 12 Maret 2011
- Andree Feilard, 1999, *NU vis-avis Negara : Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta : LKiS
- Ali Maschan Moesa, 2002, *Agama dan Demokrasi : Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, Pustaka Dai Muda, Surabaya
- \_\_\_\_\_, 2007, *Nasionalisme Kiai : Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta : LKiS
- \_\_\_\_\_, 1999, *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, Surabaya : LEPKISS
- Abdul Djamil, 2001, *Perlawanan Kiai Desa : Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifai Kalisasak*, Yogyakarta : LKiS
- Abdul Munir Mulkan, 1992, *Runtuhnya Mitos Politik santri*, Jakarta : Siepress
- Abdurrahman Wahid, 2004, *Intelektual Pesantren : Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta : LKiS
- Ahmad Zahra, 2004, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta : LKiS
- Ahmad Nur Fuad, *Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam Muhammadiyah, 1923-2008 : Tinjauan Sejarah Intelektual*, Disertasi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya
- Achmad Patoni, 2007, *Peran Kiai Pesantren dalam Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Achmad Zaini, 2003, *NU dan Politik, NU dan Politik : Studi Tentang Konflik-Konflik*

- Internal NU 1952-2003*, Tesis UI, Tidak Dibukukan
- Ali Haedar, 1998, *NU dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fiqh Dalam Politik*, Jakarta : Gramedia
- Arnold C. Brackman, 1963, *Indonesian Communism : A History*, New York : Frederrick A. Praeger
- Anselm Strauss, Juliet Corbin, 1990, *Basic of Qualitative Research : Grounded Theory and Techniques*, California : SAGE Publications, Inc
- Arizal Mutahir, 2011, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu : Sebuah Gerakan Untuk Melawan Dominasi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Bagong Suyanto, (ed), 2010, *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Yogyakarta, Aditya Media
- Bagus Takwim, 2006, *Habitus : Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup dalam Resistensi Gaya Hidup : Teori dan Realitas*, Yogyakarta, Jalasutra
- Burhan Mungin, 2007, *Penelitian Kualitatif : komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Badrun Alaena, 2000, *NU : Kritisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, Yogyakarta : Tiara Wacana
- Bahrul 'Ulum, 2002, *Bodohnya NU atau NU Dibodohi? Jejak Langkah NU Era Reformasi : Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik*, Ar-Ruzz, Yogyakarta
- Bambang Pranowo, 1991, *Ceasing The Tradition of Islam in Java*, Disertasi tidak dibukukan
- Binhad Nurrohmat, (Peny), 2010, *Dari Kiai Kampung ke NU Miring*, Malang : Avveroes
- Clifford Geertz, 1960, *The religion of Java*, New York, The Free Press
- \_\_\_\_\_, 1959, "The Javanese Kyai : The Changing Role of Cultural Broker", dalam *Comparative Studies in Society and History*
- Dawam raharjo, 1983, *Dunia Pesantren Dalam Peta Pembaharuan*, Jakarta : LP3S
- Donald Hindley, 1966, *The Communist Party in Indonesia, 1951-1963*, Berkeley and Los Angeles : University of California Press
- Djam'an Satori, Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Endang Turmuzi, 2003, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta : LKiS
- E.Kristi Poerwandari, 1994, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi UI
- Flick Uwe, 1995, *An Introduction to Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Ernst Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar
- Fauzi Fashri, 2007, *Penyingkapan Kuasa Simbol : Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta, Juxtapose
- Flick Uwe, 1995, *An Introduction to Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Greg Fealy, 2003, *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta : LKiS
- Hamid Patilima, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Haedar Nashir, 2007, *Gerakan Islam Syariat : Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta, PSAP
- Haryamoko, 2003, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa : Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu*, Jurnal Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu, No 11-12
- Hiroko Horikoshi, 1987, *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta : P3M
- Ibn Qoyim Ismail, 1997, *Kiai Penghulu Jawa : Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta : GIP
- Iik Arifin Mansur Noor, 1990, *Islam ini an Indonesian World : Ulama of Madura*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Imron Arifin, 1992, *Kepemimpinan Kiai : Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang :

Kalimasada Press

- Imam Nahrawi, 2005, *Moralitas Politik PKB : Aktualita PKB Sebagai Partai Kerja, Partai nasional dan Partai Modern*, Malang : Averroes
- In'am Sulaiman, 2010, *Masa depan Pesantren: Eksistensi Pesantren Di Tengah Gelombang Modernisasi*, Malang : Madani
- Indi Aunullah, 2006, *Bahasa dan Kuasa Simbolik Dalam Pandangan Pierre Bourdieu*, Yogyakarta : Fakultas Filsafat UGM
- John W. Creswell, 1994, *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*, London : SAGE Publications
- Kang Young Soon, 2008, *Antara Tradisi dan Konflik : Kepolitikan NU*, Jakarta : UI Press
- Kacung Marijan, 1992, *Quo Vadis NU : Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, Jakarta : Erlangga
- Khamami Zada (ed.), 2010, *Nahdlatul Ulama : Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta : Kompas
- Khoiruddin, 2005, *Politik Kiai : Polemik Keterlibatan Kiai Dalam Politik*, Malang : Averroes
- Komaruddin Hidayat, M. Yudie Haryono, 2004, *Manuver Politik Ulama : Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*, Yogyakarta : Jalasutra
- Leslie Palmer, 1973, *Communists in Indonesia*, London : Weidenfeld and Nicholson
- Luluk Yunan Ruhensi, *Kiai dan Pendidikan Pesantren : Studi Tentang Motif Perubahan Perilaku Kiai Pesantren di kabupaten Ponorogo*, Disertasi, Tidak Dibukukan
- M.Faiqul Ikhsan, *Khittah 1926 dan Perilaku Politik Ulama NU*, Tesis, Tidak dibukukan
- Martin van Bruinessen, 1994, *NU : Tradisi, Relasi Kuasa dan pencarian wacana Baru*, Yogyakarta : LKiS
- Mahrus Irsyam, 1984, *Ulama dan Partai Politik*, Jakarta : Yayasan Perkhidmatan
- M.Muchsini Jamil, 2005, *Tarekat dan Dinamika Sosial Politik : Tafsir Sosial Sufisme Nusantara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Manfred Ziemek, 1986, *Pesantren dalam Perubahan*, Jakarta : P3M
- Masruhan, 2010, *Konflik Politik Kiai NU Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 : Analisis Fiqh Ikhtilaf*, Disertasi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tidak Dibukukan
- Mochtar Naim, 1960, "The Nahdlatul Ulama as a Political Party, 1952-1955 : An Enquiry into the Origins of Its Electoral Success", (MA Thesis, McGill University)
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta : UI Press
- Michael Quinn Patton, 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nirzalin, *Krisis Agensi Politik Teungku Dayah di Aceh*, Disertasi, Program Doktor Sosiologi, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2011
- Norman Blaikie, 2000, *Designing Social Research*, Cambridge UK : Polity Press
- Norman.K.Denzin, Yvonna S.Lincoln (Eds.), 2008, *The Landscape of Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (Eds.), 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London : SAGE Publications
- Pierre Bourdieu, 1991, *Language and Symbolic Power*, Cambridge, Polity Press
- \_\_\_\_\_, 1990, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press
- \_\_\_\_\_, 1984, *Distinction : A Social Critique of the Judgment of Taste*, London, Routledge
- \_\_\_\_\_, 1990, *In Other Words : Essays Towards a Reflexive Sociology*, Cambridge, Polity Press
- Pradjarta Dirdjosanjoto, 1999, *Memelihara Umat : Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa*,

Yogyakarta :LkiS

- Richard Harker, et.all, 2003, *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik*, Yogyakarta, Jalasutra
- Ridwan, 2004, *Paradigma Politik NU : Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda
- Sabili, *Islam Kawan atau Lawan*, Majalah Islam Edisi Khusus, Juli 2004
- Sabili, *Sejarah Emas Muslim Indonesia*, Majalah Islam, No.9 Th.X 2003
- Sholahuddin Malik, *Kepemimpinan Pesantren dan Rutinisasi Kharisma, Studi di PP As-Syafi'iyah*, Jakarta, Tesis UI, Tidak dibukukan
- Syaiful Arif, 2010, *Runtuhnya Politik NU : Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta : Kompas
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sidik Jatmika, 2005, *Kiai dan Politik Lokal : Studi Tentang Reposisi Politik Kiai NU Kebumen, Jawa Tengah Memanfaatkan Peluang Keterbukaan Partisipasi di Era Reformasi*, Disertasi, Program Doktor Sosiologi UGM, Tidak Dibukukan
- Sukamto, 1999, *Dinamika Kepemimpinan Kiai*, Jakarta : LP3S
- Sunyoto Usman, 1990, *Local Elities and development*, Flinders University, Australia, Disertasi, Tidak Dibukukan
- \_\_\_\_\_, *Komunitas Tarekat dan Politik Lokal di Era Orde Baru, Penelitian di Kudus, Jawa Tengah*, Jurnal JSP, Fisipol UGM, Juli 1998
- S. Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Bandung : Transito
- Tashwirul Afkar, *Simpang Jalan NU*, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 17 Tahun 2004
- Yusny Saby, 2000, *A Profile Of The “Ulama” in Acehnese Society*, *Al Jamiah (Journal Of Islamic Studies)*, Yogyakarta : Volume 38, Number 2
- Zainal Arifin Thoha, 2003, *Runtuhnya Singgasana Kiai : NU, Pesantren dan Kekuasaan, Pencarian Tak Kunjung Selesai*, Yogyakarta : Kutub
- Zamakhsyari Dhofier, 1982, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta : LP3ES